

# DAMPAK PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA (IKN) TERHADAP SOCIAL SECURITY DALAM PERSPEKTIF KITAB NITISAstra

Oleh:

Angga Dwi Saputra<sup>1</sup>, Gede Agus Siswadi<sup>2</sup>

STAHN Jawa Dwipa Klaten Jawa Tengah

Email: [anggabs1312@gmail.com](mailto:anggabs1312@gmail.com)

## ARTICLE INFO

### Article History:

Naskah Masuk : 16 Oktober 2025

Naskah Direvisi : 25 November 2025

Naskah Disetujui : 7 Desember 2025

Tersedia Online : 31 Januari 2026

### Keywords:

National Capital City (IKN);

Relocation; Social Security;

Nitisastra; Hindu Leadership.

### Kata Kunci:

Ibu Kota Negara; Pemindahan;

Social Security; Nitisastra;

Kepemimpinan Hindu



This is an open access article under the CC BY. SA

Copyright © 2026 by Author. Published by Samsara Publishing House

## ABSTRACT

*In Indonesia, various factors have been considered in the decision to relocate the National Capital City (Ibu Kota Negara/IKN). These include social, economic, political, cultural, defense and security considerations, as well as vulnerability to natural disasters. Socio-economic and demographic disparities have become one of the main driving forces behind the plan to relocate Indonesia's capital. The relocation of the capital outside Java is intended to reduce the severe ecological burden currently borne by Jakarta, including overpopulation, traffic congestion, air pollution, and deteriorating water quality. However, relocating a capital city is not an easy undertaking because the capital serves as the primary center of social, economic, and political activities. Therefore, any miscalculation in the relocation process has the potential to create various social and developmental problems. This article aims to examine the impact of the National Capital relocation on social security from the perspective of the Nitisastra text. The study focuses on the implications of the relocation for communities in both the former capital region and the new capital region. The research employs a qualitative method with a historical approach. Data were collected through an extensive review of books, academic journals, news articles, and other relevant literature concerning the relocation of the National Capital. The collected data were then classified according to their respective thematic discussions. The findings indicate that the relocation of the National Capital has the potential to serve as a solution to existing developmental challenges while simultaneously generating positive impacts on social security for communities in both the former capital region (DKI Jakarta) and the new capital region (East Kalimantan).*

## ABSTRAK

Negara Indonesia, terdapat berbagai faktor yang menjadi pertimbangan perlunya dilakukan pemindahan Ibu Kota Negara. Antara lain faktor sosial, ekonomi, politik, budaya,

\*Corresponding author

E-mail addresses: [anggabs1312@gmail.com](mailto:anggabs1312@gmail.com) (Angga Dwi Saputra)

pertahanan dan kemanan, hingga faktor bencana alam. Kesenjangan sosial ekonomi dan kependudukan merupakan salah satu faktor pendorong rencana pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia. Pemindahan Ibu Kota Negara ke luar Jawa bertujuan untuk mengurangi beban ekologis kota Jakarta yang sudah sangat berat. Baik itu berupa kepadatan penduduk, kemacetan lalu lintas, polusi udara hingga kondisi air yang kurang baik. Pemindahan ibu kota bukanlah hal yang mudah karena ibu kota adalah kota utama dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan politik sehingga kesalahan pemindahan berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dampak pemindahan Ibu Kota Negara terhadap social security dalam perspektif kitab nitisastra. Baik untuk masyarakat di daerah ibu kota lama maupun di daerah ibu kota baru. Data dalam penelitian ini menggunakan dengan metode kualitatif menggunakan pendekatan historis. Proses pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari buku, jurnal, berita maupun bahan bacaan lainnya yang berhubungan dengan topik pemindahan Ibu Kota Negara untuk kemudian diklasifikasikan berdasarkan pokok bahasan masing-masing. Dalam artikel ini menunjukkan bahwa pemindahan Ibu Kota Negara mampu menjadi solusi dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi sekaligus memberikan dampak positif terhadap social security bagi masyarakat baik di daerah eks Ibu Kota (DKI Jakarta) maupun untuk masyarakat di daerah Ibu Kota Negara baru (Kalimantan Timur).

---

## **I. PENDAHULUAN**

Ibu kota mempunyai fungsi strategi, ibu kota selalu menjadi target utama dalam situasi peperangan, karena dengan menguasai ibu kota biasanya menjadi jaminan menguasai sebagian besar kekuatan musuh atau penentang, paling tidak menurunkan moral untuk mengalahkan musuh (militer). Seperti yang terjadi di China pada masa lalu, di mana pemerintahan tersentralisir dengan sedikit fleksibilitas pada tingkat provinsi, suatu Dinasti dapat runtuh dengan ambuknya ibu kota. Oleh sebab itu Dinasti Ming memindahkan Ibu kota Nanjing ke Beijing dengan tujuan agar dapat mengontrol musuh yang berasal dari Mongols dan Manchus (Sutikno, 2007).

Peristiwa pemindahan ibu kota negara telah banyak dilakukan oleh beberapa negara dengan alasan yang beragam. Beberapa diantaranya, pertama,

Brasilia ibu kotanya terletak di pedalaman, karena ibu kota lama Rio Jenairo sudah terlalu padat. Kedua, pemerintah Korea Selatan pada tahun 2004 ibu kotanya pindah dari Seoul ke Sejong, meskipun Seoul itu berarti ibukota dalam bahasa Korea. Ketiga, ibu kota tradisional yang secara ekonomi memudar akibat kota pesaingnya, seperti Nanjing yang memudar oleh Shanghai. Keempat, akibat menurunnya dinasti atau budaya, Ibu Kota yang ada menjadi pudar dan kalah pamor seperti yang terjadi di Babilon dan Cahokia (Yahya, 2018).

Di Indonesia, terdapat berbagai faktor yang menjadi pertimbangan perlunya dilakukan pemindahan Ibu Kota Negara. Antara lain faktor sosial, ekonomi, politik, budaya, pertahanan dan keamanan, bahkan sampai dengan potensi bencana alam menjadi pertimbangan pentingnya Ibu Kota Negara dipindahkan dari Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Juga karena kepadatan penduduk yang tidak merata dan cenderung terkonsentrasi di Pulau Jawa telah berdampak pada kesenjangan dalam berbagai aspek dan stagnasi ekonomi yang tidak kunjung dapat diperbaiki (FISIP UI, 2020).

Kesenjangan sosial ekonomi dan kependudukan merupakan salah satu faktor pendorong rencana pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Sekitar 57,4% penduduk Indonesia terkonsentersasi di Pulau Jawa. Sementara sebaran penduduk di Sumatera sebesar 17,9%, Bali dan Nusa Tenggara 5,5%, Kalimantan 5,81%, Sulawesi 7,31%, Maluku dan Papua 2,61%. Padatnya jumlah penduduk di Pulau Jawa menunjukkan adanya aglomerasi pembangunan dan kemajuan yang tinggi di Jawa dan sebaliknya ketertinggalan di wilayah lainnya. Pemindahan Ibu Kota Negara ke luar Jawa bertujuan untuk mengurangi beban ekologis kota Jakarta yang sudah sangat berat. Jakarta telah mengalami kemacetan parah, serta polusi dan air yang semakin buruk (FISIP UI, 2020).

Untuk mengatasi berbagai permasalahan ibu kota tersebut, salah satu solusi yang bisa dilakukan adalah dengan memindahkan ibu kotanya. Tetapi sebelum itu dilakukan perlu ada analisis kuat dari berbagai aspek bidang, dari aspek keruangan, ekologis dan kewilayahan serta dampak sosial, ekonomi, dan politik, menghasilkan suatu pemikiran bahwa pemindahan ibu kota merupakan suatu

keharusan. Atau ibu kota negara tetap di suatu daerah tetapi pemindahan beberapa departemen dan pusat-pusat kegiatan dialihkan ke luar daerah tadi (Ridho, 2020).

Namun demikian, dua perkembangan telah menarik dari pemindahan ibu kota kembali ke ranah publik dan akademik. Pertama, perkembangan kota yang pesat, integrasi negara-negara pascakolonial ke dalam sistem internasional, dan pertumbuhan perdagangan antarnegara telah menciptakan tantangan baru bagi ibu kota, terutama di negara berkembang. Selain itu, pemanasan global telah menciptakan risiko baru bagi beberapa ibu kota, contohnya adalah meningkatnya frekuensi dan intensitas banjir yang melanda Jakarta, Indonesia. Kedua, kemajuan teknologi komunikasi dan informasi telah secara signifikan mempengaruhi biaya pemindahan ibu kota (Reva, 2016).

Presiden Joko Widodo telah membuat keputusan untuk memindahkan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur yang disampaikan dalam konferensi pers di Istana Negara pada tanggal 26 Agustus 2019. Pemindahan ibu kota bukanlah hal yang mudah karena ibu kota adalah kota utama dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan politik sehingga kesalahan pemindahan berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan.

Dampak demografi dan ekonomi yang tidak diimbangi dengan pengelolaan yang baik akan menimbulkan berbagai masalah perkotaan. Masalah yang timbul antara lain terjadinya sentralisasi ekonomi dan politik, ketimpangan ekonomi, buruknya sistem transportasi, social security, tingginya angka kemiskinan, pengangguran, serta timbulnya konflik horizontal.

Dalam bidang social security, pemindahan Ibu Kota Negara memberikan dampak yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat. Yakni manakala pusat pemerintahan serta pihak-pihak yang berkepentingan di dalamnya melakukan migrasi atau perpindahan, tentu akan menimbulkan social effect bagi masyarakat di daerah eks ibu kota lama maupun masyarakat di daerah ibu kota baru. Aspek kesiapan masyarakat pun tak dapat dihindarkan. Perpindahan masyarakat tersebut juga berpotensi menimbulkan adanya akulturasi maupun inkulturasi budaya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kajian ini dilakukan untuk membahas dampak pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) terhadap social security.

Pengertian social security(jaminan sosial) dapat didefinisikan secara luas sebagai tindakan publik, termasuk yang dilakukan oleh masyarakat, untuk melindungi kaum miskin dan lemah dari perubahan yang merugikan dalam standar hidup, sehingga mereka memiliki standar hidup yang dapat diterima (Dasgupta, 1997).

Dalam literatur pekerjaan sosial (social work),jaminan sosial (social security)merupakan salah satu jenis kebijakan sosial untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan dalam masyarakat. Setiap negara memiliki definisi, sistem, dan pendekatan yang berbeda dalam mengatasi kemiskinan dan ketimpangan, dan karenanya memiliki sistem dan strategi jaminan sosial yang berbeda pula (Faizal Aco dan Widane, 2020).

Kata “Jaminan sosial” berasal dari kata social dan security. Securitydiambil dari Bahasa Latin “se-curus” yang bermakna “se” (pembebasan atau liberation) dan “curus” yang berarti (kesulitan atau uneasiness). Sementara itu, kata “social” menunjuk pada istilah masyarakat atau orang banyak (society). Dengan demikian, jaminan sosial secara harafiah adalah “pembebasan kesulitan masyarakat” atau “suatu upaya untuk membebaskan masyarakat dari kesulitan.” Jaminan sosial merupakan bentuk solidaritas sosial kepada anggota masyarakat, terutama kelompok lemah atau rentan (vulnerable groups). Negara adalah representasi masyarakat yang bertanggungjawab dalam membantu kelompok ini, yang karena hambatan fisiknya (orang cacat), kulturalnya (suku terasing) maupun strukturalnya (penganggur), tidak mampu merespon secepat perubahan sosial di sekitarnya, terpelanting ke pinggir dalam proses pembangunan yang tidak adil (Suharto, 2011).

Dengan demikian, yang dimaksud dengan jaminan sosial adalah kemampuan masyarakat secara mandiri untuk terus berkembang serta mewaspadaai, mencegah, dan mengatasi terjadinya krisis, yang bersumber dari faktor internal maupun faktor eksternal, sehingga dapat terwujud suatu kesejahteraan sosial yang adil.

## II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang berfokus pada analisis dampak pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) terhadap *social security* dalam perspektif Kitab Nitisastra. Data primer penelitian diperoleh dari teks Kitab Nitisastra sebagai sumber utama yang memuat ajaran tentang kepemimpinan, tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, dan keamanan sosial. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai literatur ilmiah, peraturan perundang-undangan terkait IKN, artikel jurnal, buku, dan dokumen kebijakan yang membahas aspek sosial, ekonomi, dan keamanan dalam pembangunan IKN. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan menelaah berbagai sumber yang relevan dengan tema penelitian. Analisis data dilakukan menggunakan metode deskriptif-interpretatif dan hermeneutik untuk memahami makna nilai-nilai yang terkandung dalam Kitab Nitisastra serta relevansinya terhadap fenomena pemindahan IKN. Data yang telah terkumpul direduksi, diklasifikasikan, dan diinterpretasikan berdasarkan konsep-konsep *social security*, seperti perlindungan sosial, kesejahteraan masyarakat, stabilitas sosial, dan keadilan distributif. Selanjutnya, dilakukan analisis komparatif antara prinsip-prinsip tata negara dan kesejahteraan rakyat dalam Kitab Nitisastra dengan berbagai dampak sosial yang muncul akibat pembangunan dan pemindahan IKN. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai kontribusi ajaran Nitisastra dalam memberikan landasan etis dan filosofis bagi penguatan *social security* di tengah transformasi sosial yang ditimbulkan oleh pemindahan Ibu Kota Negara.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Menteri PPN/ Kepala Bappenas saat itu, Bambang Brodjonegoro, bahwa tujuan pemindahan Ibu Kota Negara adalah untuk mengurangi beban Jakarta dan Jabotabek, mendorong pemerataan pembangunan ke wilayah Indonesia bagian timur; mengubah mindset pembangunan dari Jawa-centris menjadi Indonesia-centris; memiliki ibu kota negara yang merepresentasikan identitas bangsa, kebhinnekaan dan penghayatan terhadap Pancasila; dan meningkatkan pengelolaan pemerintahan pusat yang efisien dan efektif. Terakhir adalah agar memiliki ibu kota negara yang menerapkan konsep smart, green, and beautiful

city untuk meningkatkan kemampuan daya saing (competitiveness) secara regional maupun internasional.

Salah satu alasan pemilihan Pulau Kalimantan menjadi lokasi Ibu Kota Negara baru adalah karena letaknya yang strategis di tengah Indonesia. Dengan berpindahnya Ibu Kota Negara, maka semua pusat kebijakan dan penyelenggaraan pengembangan kompetensi pejabat pemerintahan pun secara otomatis akan ikut berpindah. Hal ini diyakini dapat mengeliminasi permasalahan jarak yang selama ini terjadi dalam pengembangan kompetensi.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemindahan Ibu Kota Negara akan menimbulkan dampak baik dari segi infrastruktur, pemerintahan maupun dari masyarakat. Dalam kajian ini pembahasan dampak pemindahan Ibu Kota Negara terhadap bidang social security dikategorikan dalam 2 jenis, yakni di daerah ibu kota lama serta di daerah ibukota baru.

### **3.1 Dampak Pemindahan Ibu Kota Negara terhadap Social security di Daerah Ibukota lama**

Gagasan wacana pemindahan ibu kota ini menuai banyak polemik di masyarakat, sebagai contoh ada yang pro dan ada yang kontra terhadap banjir di Jakarta, bagi yang terkena banjir berpendapat menginginkan ibu kota pindah, bagi yang tidak terdampak berpendapat tidak menginginkan ibu kota dipindahkan. Menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, menuturkan ada banyak pertimbangan kenapa ibu kota harus dipindahkan dari Jakarta. Salah satunya terkait faktor daya dukung. Kemudian faktor persebaran penduduk juga turut menjadi pertimbangan utama pemindahan ibu kota. Faktor berikutnya yaitu pemerataan pembangunan nasional. Dia menyatakan, berpindahnya ibu kota akan menjadi salah satu instrumen pembangunan infrastruktur di wilayah lain yang saat ini sedang diusung pemerintah. Seperti dalam Kitab Nitisastra IV.3:

*ring widyā wiśa tulya denikang anabhyāsālasang sampñēh,  
yan tan jīrṇa tikāṅ bhinojana hatur wiśyātēmah wyadhaya,  
ring hinārtha daridra tulya wiśa goṣṭhinyātēmah manglare,  
ring kanyā wiśa tulya ring jaḍa pikun tanpāmṛētangde wingit.*

Terjemahan:

Ilmu pengetahuan akan seperti racun bagi mereka yang tidak terbiasa dan malas untuk mempraktekannya. Jika tidak bisa dicerna, makanan akan menjadi racun dan menjadikan orang sakit. Bagi mereka yang bodoh dan miskin, berkumpul dengan orang banyak juga seperti racun karena menyebabkan mereka berkecil hati. Bagi orang tua renta yang sudah jompo pikun dan dekat ajalnya maka perawan muda juga dianggap sebagai racun karena hanya akan membuat sedih hati dan mendongkolkan belaka.'

Dapat di simpulkan sebagai pemimpin masyarakat harus berani mengambil resiko dan tidak hanya diam karena selayaknya pemimpin itu sebagai panutan bawahnya, seorang pemimpin harus memberikan ide/cara bagaimana rakyatnya selalu makmur dan bahagia tanpa ada tekanan atau penderitaan yang dialami oleh rakyatnya bukan malah sebaliknya pemimpin hanya diam tanpa memberikan arahan atau solusi,hal itu sudah tertera di atas dikatakan "Ilmu pengetahuan akan seperti racun bagi mereka yang tidak terbiasa dan malas untuk mempraktekannya. Jika tidak bisa dicerna, makanan akan menjadi racun dan menjadikan orang sakit".

Terdapat berbagai kegiatan yang dilakukan penduduk perkotaan dalam bidang ekonomi (perdagangan, pemasaran industry, keuangan, perbankan, dan jasa perkotaan lainnya), dalam bidang sosial (seperti pendidikan, kesehatan, dan interaksi social lainnya), dan dalam bidang administrasi pemerintahan (birokrasi, pembangunan daerah, layanan publik, dan administrasi pemerintahan lainnya). Berbagai kegiatan perkotaan tersebut melibatkan peran serta sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya modal, sumber daya teknologi, sumber daya kelembagaan, dan sumber daya lainnya untuk melakukan produksi, menghasilkan barang dan jasa, untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Adanya perpindahan Ibu Kota Negara mengakibatkan berkurangnya kepadatan di Jakarta. Baik itu kepadatan penduduk maupun kepadatan dalam aktivitas pembangunan. Hal ini dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat yang bertahan di daerah Jakarta. Dimana kepadatan perkotaan yang dirasakan dapat berkurang, serta kepadatan dalam aktivitas pembangunan pun juga berkurang. Secara tidak langsung, hal ini juga berdampak dalam berkurangnya persaingan dalam mencari pekerjaan. Di kota Jakarta, dan kota-kota besar lainnya, terdapat kecenderungan bahwa jumlah kendaraan bermotor bertambah setiap tahunnya dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi (di atas 10 persen), sedangkan prasarana yang tersedia terbatas,

pembangunan jalan baru sangat lambat pertambahannya (hanya 0,05 persen), Hal ini dipastikan akan mengakibatkan kepadatan lalu lintas bertambah tinggi, dan pada beberapa ruas jalan akan meningkat menjadi kemacetan lalu lintas (Adisasmita dan Adisasmita, 2011).

Pembangunan perkotaan yang sangat massif dan intensif, yang ditunjukkan oleh pembangunan gedung dan bangunan permanen, meliputi rumah penduduk yang sangat banyak jumlahnya, karena jumlah penduduk perkotaan bertambah terus, di samping itu terdapat banyak gedung-gedung bertingkat tinggi (seperti hotel, apartemen, kantor-kantor pemerintah dan swasta, dan lainnya, demikian pula industri besar) semuanya bangunan itu tentunya membutuhkan air dalam volume besar, cara yang paling mudah serta murah adalah membangun instalasi yang menyedot air tanah dalam volume yang sangat besar.

Pengambilan air tanah dalam volume yang sangat besar, dampaknya akan menurunkan permukaan tanah secara meyakinkan. Di Jakarta dan sekitarnya banyak gedung-gedung bertingkat tinggi, yang melakukan penyedotan air bawah tanah dalam volume yang sangat besar, maka tidak diherankan permukaan tanah di Jakarta mengalami penurunan yang cukup berarti (Adisasmita dan Adisasmita, 2011).

Pemindahan Ibu Kota Negara juga memberi dampak berkurangnya eksploitasi terhadap tanah dan sumber air yang selama ini terjadi sehingga kualitas air bersih di Jakarta dapat menjadi lebih baik. Seperti dalam kitab kakawin Nitisastra IV.14:

*Sang Wedajña Phalanya Homa Wanguněn Byaktāmṛēteng Rat Kabeh,  
Śilāwretti Phalanya Ring Śruti Pagēh Ring Buddhi Tan Cañcala,  
Bhogānindya Phalanya Yan Kinahanan Ring Arthadāneng Prajā.  
Ring Stri Putra Pahalanya Ring Surata Len Śardūlawikrīḍita.*

Terjemahan:

Orang yang paham kepada Weda perlu mengadakan korban suci agar mendatangkan keselamatan bagi semua orang. Orang yang suka mendengarkan sabda Weda akan memiliki pikiran yang tenang sehingga dapat melakukan perbuatan yang baik. Bagi yang suka bersedekah kepada orang lain akan dapat mencapai kesenangan hidup dan kemasyhuran. Bagi seorang istri, adalah seorang anak-anak laki-lakinya yang diharapkan menjadi buah kenikmatan percintaannya

Dapat di simpulkan bahwa orang yang paham akan pengetahuan Weda harus disempurnakan dengan kegiatan kurban suci dan beramal atau berpunia. Jika kita sudah memahami Weda, tetapi tak mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, tidak akan ada keselamatan, kebahagiaan, maupun kemasyhuran. Hanya mereka yang mengamalkan Weda yang akan mencapai semua itu. Maka dari itu pemerintah memindahkan Ibu Kota Negara yang diikuti oleh perpindahan masyarakat, secara tidak langsung juga akan mengurangi tingkat kepadatan kendaraan dan polusi yang dihasilkan. Sehingga hal tersebut juga memberikan dampak yang positif dimana udara di daerah eks ibu kota (Jakarta) menjadi lebih bersih dan polusi yang dihasilkan dari asap kendaraan bermotor pun berkurang dan juga air yang bersih.

### **3.2 Dampak Pemindahan Ibu Kota Negara terhadap Social security di Daerah Ibu Kota Baru**

Pemindahan IKN ke lokasi yang baru diharapkan membawa dampak baik bagi kesejahteraan masyarakat. Hal ini menjadi harapan ke depan berkenaan dan sejalan dengan niat Pemerintah di balik pengambilan kebijakan tersebut. Menurut Ir. Rudy Soepriyadi Prawiradinata, MCRP, Ph.D selaku Deputy Bidang Pengembangan Regional Bappenas, menjelaskan bahwa total luas wilayah Ibu Kota Negara adalah 256.142,72 hektar. Terdiri dari 5.664 hektar rencana kawasan Inti Pusat Pemerintah, 56.180,87 hektar rencana kawasan Ibu Kota Negara dan selebihnya rencana kawasan perluasan Ibu Kota Negara.

Perkiraan kondisi sosial dan budaya yang akan terjadi nantinya di Ibu Kota Negara Baru, keberagaman budaya makin meningkat bukan hanya etnis tapi ekonomi dan tingkat pendidikan, urbanisasi dan mengarah munculnya kota metropolitan, terbukanya peluang usaha dan bekerja yang dapat memicu konflik sosial antar kelompok etnis serta keberadaan simbolisasi nasional dan kekayaan budaya lokal di Ibu Kota Negara. Seperti dalam Kitab Nitisastra IV.4:

*Ring janmādhika meta citta rēsēping sarwa prajāngenaka,  
ring strī madhya manohara priya wuwustāngde manah kūng lulut,  
yan ring madhyani sang pinandita mucap tatwopadeśa prihēn,  
yan ring madhyānikāṅ musuh mucapakēn wākśūra singhākṛēti.*

Terjemahan:

Bagi orang-orang terkemuka (pemimpin) harus bisa mengambil hati dan menyenangkan hati banyak orang. Ketika bersama perempuan yang dicintainya, (laki-laki) kekasihnya harus bisa berkata-kata manis yang menimbulkan rasa sayang. Jika berkumpul dengan pendeta, harus dapat membicarakan ajaran-ajaran agama yang baik (tattwopadeśa). ucapkanlah kata-kata yang menunjukkan keberanian seperti layaknya seekor singa.

Dapat di simpulkan bahwa Pemimpin yang baik adalah yang bisa mengambil hati dan menyenangkan orang-orang yang dipimpinnya. Hal itu bisa dilakukan dengan menunjukkan perhatian dan kepedulian terhadap rakyatnya. Dengan begitu, ia pun akan dicintai oleh rakyatnya maka dari itu pemerintah berharap dengan perpindahan ibu kota baru ini bisa mensejahterakan hidup masyarakat masyarakat yang jatuh dari pengawasan pemerintah seperti nanti pemerintah membuka lowongan kerja untuk masyarakat kalimantan karena setelah selesai pemindahan ibu kota ini pemerintah pasti membutuhkan banyak tenaga kerja.

Pemindahan Ibu Kota Negara diharapkan dapat menguatkan ketahanan masyarakat Kalimantan, baik secara ekologi, ekonomi, sosial dan budaya sehingga tidak menyebabkan terpinggirnya masyarakat lokal oleh pendatang. Pendatang tidak hanya pejabat pemerintahan namun juga keluarga dan pelaku ekonomi lainnya. Dalam rencana pemindahan pejabat pemerintahan, misalnya untuk aparatur sipil negara (ASN), berkembang dua skenario yang memperkirakan perpindahan sebesar 182.462 orang ASN dan 118.513 orang ASN (jika dibatasi umur hingga 45 tahun).

Perpindahan ASN tersebut akan diikuti dengan keluarga dan pelaku ekonomi lainnya, yang diperkirakan sebesar 1,5 juta orang di masa mendatang. Masyarakat berharap agar integrasi kehidupan masyarakat yang berkeadilan dapat terjadi sehingga manfaat pembangunan IKN dirasakan oleh seluruh masyarakat Kalimantan khususnya dan Indonesia umumnya. Pemindahan Ibu Kota Negara juga dapat menyebabkan inkulturasi atau masuknya budaya-budaya jawa ke masyarakat di Kalimantan Timur, sehingga dapat terjadi pergeseran budaya atau adat istiadat. Dengan kata lain, dapat juga terjadi meleburnya budaya masyarakat pendatang (Jawa) dengan masyarakat asal (Daya) menjadi sebuah akulturasi budaya. (Pusat Riset Politik, 2022). Seperti dalam Kitab Nitisastra IV.10:

*Singhā rakṣaṇaṁ halas halas ikaṁ rakṣeṁ harī nityaśa,*

*singhā mwan wana tan patūt paḍa wirodhāṅdoh tikang keśari,  
rug brāṣṭa ng wana denikang jana tinor wrēkṣanya śirṇāpaḍang,  
singhāṅghōt ri jurang nikang tēgal ayūn sām̐pun dinon durbala.*

Terjemahan:

Singa adalah penjaga hutan, tetapi juga selalu dijaga oleh hutan. Jika singa dengan hutan berselisih, mereka marah, lalu singa itu meninggalkan hutan. Hutannya dirusak, binasakan orang, pohon-pohonnya ditebangi sampai menjadi terang, singa yang lari bersembunyi dalam curah, di tengah-tengah ladang, diserbu dan dibinasakan.

Hal senada juga ditulis dalam Kakawin Nāgara Kṛtagama, pupuh 89. 2:

*āpanikang pura len swawīṣaya kadi singha lawan gahana,  
yan rusakang thani milwangakurangupajīwa tikang nāgara,  
yan taya bhṛtya katon waya nika para nūṣa tēkang rēwēka,  
hetu nikān padha rākṣana pagēha kalih phalaning mawuwus.*

Terjemahan:

‘Sebab negara (keraton) dengan wilayah-wilayahnya (desa-desa) ibarat singa dengan hutan. Bila desa-desa itu rusak, negara akan kekurangan bahan pangan. Bila tak ada alat negara yang kuat, pasti negara luar mudah menyerangnya. Karena itu, pelihara dan pertahankan keduanya agar berhasil perintahku’

Dapat di simpulkan jika pemerintah berani menindahkan ibu kota pemerintah juga harus bisa menganut adat, tradisi dan peraturan yang ada ditempat tersebut tanpa merubah rubah suatu peraturan yang ada dan juga pembangunan ini tidak merusak hutan secara berlebihan menebangi pohon secara sembarangan karena itu akan menyebabkan banyak bencana yang akan berdampak ke ekosistem hewan yangbbberada di hutan tersebut.

Perpindahan pejabat pemerintahan beserta keluarganya pada akhirnya juga mengakibatkan meningkatnya kebutuhan fasilitas-fasilitas pendukung kehidupan seperti hunian, sekolah, rumah sait dan sebagainya. Sehingga permasalahan pemerataan pembangunan di daerah pun dapat diselesaikan. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan dari pemindahan Ibu Kota Negara yang telah disampaikan sebelumnya yakni untuk mengatasi pertumbuhan daerah yang sebelumnya tidak merata sehingga dapat teratasi dengan pemindahan Ibu Kota Negara baru.

Pemindahan Ibu Kota Negara juga dapat menyebabkan inkulturasi atau masuknya budaya-budaya jawa ke masyarakat di Kalimantan Timur,

sehingga dapat terjadi pergeseran budaya atau adat istiadat. Dengan kata lain, dapat juga terjadi meleburnya budaya masyarakat pendatang (Jawa) dengan masyarakat asal (Daya) menjadi sebuah akulturasi budaya.

#### **IV. SIMPULAN**

Pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur membawa berbagai dampak terhadap keamanan dan kesejahteraan sosial (social security), baik bagi daerah asal maupun daerah tujuan. Di Jakarta, perpindahan ini memberikan dampak positif seperti berkurangnya kepadatan penduduk dan aktivitas pembangunan, yang turut mengurangi kemacetan, polusi udara, serta persaingan dalam mencari pekerjaan. Selain itu, eksploitasi air tanah juga menurun sehingga kualitas air bersih dapat meningkat, dan tekanan terhadap infrastruktur kota menjadi lebih ringan. Sementara itu, di daerah Ibu Kota baru, pemindahan ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal melalui pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan akses terhadap fasilitas sosial seperti hunian, pendidikan, dan layanan kesehatan. Namun, tantangan sosial juga muncul, seperti potensi konflik antar kelompok etnis, urbanisasi yang cepat, dan risiko ketimpangan antara pendatang dan masyarakat lokal. Selain itu, masuknya budaya pendatang, khususnya dari Jawa, dapat menyebabkan pergeseran atau percampuran budaya dengan masyarakat asli Kalimantan, yang dikenal sebagai akulturasi. Oleh karena itu, meskipun pemindahan Ibu Kota Negara ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat pembangunan nasional dan kualitas hidup, tetap diperlukan pengelolaan yang bijak dan adil agar dampak sosial, budaya, dan lingkungan yang muncul dapat diminimalkan dan manfaatnya dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adisasmita, R. Dan Adisasmita, S. A. 2011. Logika Pemindahan Ibu Kota Jakarta. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Agassi, E. 2013. Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pemiindahan Ibu Kota Negara. Skripsi. Institut Pertanian Bogor.
- Dasgupta, P. 1997. Social Capital And Economic Performance. Washinton Dc: The World Bank.

- Faizal Aco, Dan Widane, Gd R. 2018. Pengembangan Social Security Sebagai Upaya Mitigasi Bencana Social Dalam Mega Proyek New Yogyakarta Jurnal Enersia Publika: Energi, Sosial, Dan Administrasi Publikpage 12international Airport. Jurnal Enersia Publika, Vol. 2, No. 1, Hal 38-53.
- Fisip Ui. 27 Februari 2020. Kajian Aspek Sosial Pemindahan Ibu Kota Negara. Diakses Dari <https://fisip.ui.ac.id/kajian-aspek-sosial-pemindahan-ibu-kota-negara/>.
- Pusat Riset Politik. 28 Maret 2022. Dampak Pemindahan Ibu Kota Negara Terhadap Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara. Diakses Dari <https://politik.brin.go.id/kolom/pemilu-partai-politik-otonomi-daerah/dampak-pemindahan-ibu-kota-negara-terhadap-pengembangan-kompetensi-aparatur-sipil-negara/>.
- Reva, D. 2016. Capital City Relocation And National Security: The Cases Of Nigeria And Kazakhstan," Mini-Dissertation Master Of Secutity Studies (Mss), University Of Pretoria Faculty Of Humanities: Department Of Political Sciences.
- Ridho, A. J. 2020. Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia Dalam Perspektif Fikih Siyasah. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Suharto, E. 2011. Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Sutikno. 2007. Perpindahan Ibu Kota Negara Suatu Keharusan Atau Wacana (Pusat Studi Bencana). Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Yahya, H.M. 2018. Pemindahan Ibu Kota Negara Maju Dan Sejahtera (Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat). Malang: Universitaas Merdeka Malang.